

Judul : Solusi atasi masalah Ibu&Anak stunting
Tanggal : Jumat, 02 Desember 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pemerintah Serahkan DIM RUU KIA **Solusi Atasi Masalah Ibu Anak & Stunting**

Senayan tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). RUU ini diharapkan menjadi solusi mengatasi persoalan krusial, yakni masih tingginya risiko kematian ibu dan anak hingga persoalan *stunting* atau gizi buruk pada anak.

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, persoalan stunting ini yang harus jadi perhatian.

"Kita harus menghadirkan terobosan regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KIA dari Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Senin (28/11).

DIM ini kemudian dibawa ke Panja RUU KIA untuk dibahas bersama Pemerintah. Adapun Ketua Panja RUU KIA ini adalah Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka.

"Kami bersama-sama Pemerintah akan membahas RUU ini dalam Panja, dan kami harapkan berbagai regulasi tersebut dikaji implikasinya terhadap berbagai sektor termasuk ekonomi," ujar Ace.

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga menuturkan, RUU ini sebagai tindak lanjut dari amanah UUD 1945 yang mewajibkan negara menjamin kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap warga negaranya.

Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara khususnya kesejahteraan ibu dan anak. Terlebih, dua pertiga dari seluruh populasi penduduk Indonesia merupakan perempuan dan anak.

Upaya mencegah kematian ibu dan anak, stunting merupakan tantangan yang harus ditemukan solusinya.

Adapun kesejahteraan ibu dan anak ini meliputi sejahtera secara fisik, psikis, sosial, ekonomi dan spiritual yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Ibu yang kesejahteraannya terjamin akan melahirkan anak yang bertumbuh kembang dengan baik.

"RUU KIA diharapkan menjadi wujud akan cita-cita dan komitmen DPR dan Pemerintah dalam mengatur kesejahteraan ibu dan anak Indonesia secara komprehensif," katanya.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menuturkan, Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR untuk penyusunan RUU KIA. Secara keseluruhan, Pemerintah dapat memahami semangat, cita-cita dan komitmen DPR dalam kesejahteraan ibu dan anak sebagaimana tertuang dalam RUU tentang KIA ini.

Menteri Bintang menuturkan, perundang-undangan yang me-

ngatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak masih tersebar dalam berbagai peraturan. Juga, belum mengakomodasi dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.

Untuk itu, perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif.

Dari sistematika, RUU ini terdiri dari 8 bab dan 41 pasal. Sementara dari sisi substansi, RUU ini mengatur kesejahteraan ibu dan anak. Hal ini meliputi hak dan tanggung jawab, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendidikan dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah juga memberi perhatian tidak hanya terkait hak ibu yang bekerja tetapi juga ibu dengan kerentanan khusus.

Seperti ibu yang berhadapan dengan hukum, ibu di lembaga pemasyarakatan, di penampungan, dalam situasi bencana, situasi konflik, ibu tunggal, ibu korban kekerasan, dan lainnya. Mereka mesti memperoleh haknya terkait dengan kerentanannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah melakukan dialog dengan masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, serikat pekerja, organisasi profesi, media massa, dunia usaha dan unsur lainnya dalam menyusun RUU ini.

"Untuk mengakomodir berbagai masukan, temuan-temuan agar bisa menjawab kompleksitas permasalahan kesejahteraan ibu dan anak," pungkasnya. ■ KAL